



Deeper Dive

Karya Cipta di Zamrud Khatulistiwa

Hilmar Farid

 Jalin

Tentang Penulis



Hilmar Farid. Sejarawan, budayawan, akademisi, peneliti, dan aktivis. Menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (sekarang Kementerian Kebudayaan) selama 2015-2024. Aktif menulis, mengajar di Institut Kesenian Jakarta, dan juga mengisi kuliah di universitas-universitas Indonesia serta internasional.



Karya Cipta di Zamrud Khatulistiwa

Saat berkampanye, Prabowo-Gibran menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun. Belum setahun berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah proyeksi pertumbuhan tahun ini menjadi 4,7 hingga 5%. Setiap hari kita mendengar berita tentang perusahaan yang bangkrut dan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Perang tarif yang dilancarkan Amerika Serikat ke seluruh dunia semakin mempersulit perekonomian untuk bangkit.

Di tengah ketidakpastian, semua orang mencari jalan sendiri. Mereka yang di-PHK menjadi pekerja lepas, melakukan apa saja untuk bisa

menyambung hidup, mulai dari pengemudi online sampai UMKM. Saat ini ada sekitar 60 juta UMKM yang menyerap lebih dari 90% tenaga kerja—lebih dari 80% di antaranya menggunakan modal sendiri. Tingkat kegagalannya juga signifikan. Lebih dari 60% UMKM ini gulung tikar dalam tiga tahun pertama.

Pusaran ke bawah seperti ini membuat kita bertanya: apakah tidak ada cara lain? Selama berdekade, Indonesia mengikuti pola pembangunan yang sama: tumbuh dulu, baru berbagi. Eksploitasi sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan, sehingga sektor-sektor lain bisa

berkembang. Utamakan industri dan perdagangan, lalu gunakan pendapatan nasional untuk pemerataan. Semua itu, kita tahu, tidak terjadi.

Dari waktu ke waktu, para pembuat kebijakan berputat dengan hal yang sama. Padahal, ada orang bijak yang berkata, *“insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results”*. Sudah waktunya kita berpikir *out of the box*, bukan di tingkat retorika, tapi substansi. Kita harus keluar dari kotak pikir kolonial yang melihat negeri ini sebagai hamparan lahan untuk dieksploitasi, dan mulai mengapresiasi bumi Indonesia, manusia, dan budayanya.

Multatuli menyebut Indonesia sebagai untaian zamrud khatulistiwa bukan tanpa alasan. Indonesia adalah negeri dengan keanekarag-

aman hayati dan budaya yang paling kaya di dunia. Negeri maritim terbesar di dunia, dengan puluhan ekosistem, dan lapis peradaban yang sangat beragam. Selama berabad-abad masyarakatnya menghasilkan karya cipta di berbagai bidang yang mempesona dunia sampai hari ini.

Diskusi tentang perekonomian ke depan harus berpijak pada fakta dasar ini. Pendekatan tentang pembangunan mesti berbeda sama sekali. Ini soal imajinasi dan keberanian. Kemampuan membayangkan dunia yang berbeda dan berani mengambil langkah menuju ke sana. Kita dapat menciptakan perekonomian yang didasarkan pada kerja melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya kita sebagai dasar kehidupan bersama.



Source: Greenpeace

Kontrak Sosial yang Retak

Konstitusi adalah bentuk tertulis dari kontrak sosial di antara warga ketika membentuk negara. Tujuan bernegara kita jelas, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan itu, dibentuk pemerintah yang bertugas melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Source: Pexels/Mikhail Nilov

Pertanyaannya, apakah setelah 80 tahun merdeka, kita sudah melaksanakan amanat itu dengan baik? Jika melihat pola pembangunan 60 tahun terakhir, nampaknya tidak. Sejak masa Orde Baru, eksploitasi sumber daya alam, terutama pertanian dan pertambangan, berlangsung masif untuk melayani *global supply chain* sampai hari ini. Hampir 60% dari total ekspor kita berasal dari dua sektor tersebut, sementara penyerapan tenaga kerjanya hanya 1,2% dari total tenaga kerja nasional.

Distribusi manfaat dari sektor ini juga tidak merata. Kita jengah melihat para “sultan” batu bara, nikel, dan kelapa sawit yang berjaya dengan kehidupan mewah, sementara masyarakat di sekitar lokasi tambang dan perkebunan hidup dalam kesulitan. Daerah penghasil kekayaan itu seperti Kalimantan, Papua, dan Sulawesi, tetap saja miskin sekalipun sumbangannya pada PDB nasional amat besar. Belum lagi konflik sosial terkait penguasaan lahan atau kerusakan lingkungan yang memperparah krisis iklim global.

Kondisi ini mendesak kita untuk memperbarui kontrak sosial kita. Petani, masyarakat adat, buruh perkotaan, pekerja migran, para cendekia,

pengusaha kecil dan menengah, dan semua saja yang berkontribusi pada pembangunan nasional kita, harus terlibat dalam proses ini. Titik tolaknya adalah pemahaman yang utuh mengenai masyarakat, alam, dan budaya, sehingga lahir konsep pembangunan yang memang sesuai dengan bumi manusia Indonesia.

Dari peta jalan inilah kita juga bisa merancang jenis pekerjaan yang diperlukan, arah pendidikan, pemajuan kebudayaan, dan juga pengelolaan alam secara bijak dan lestari. Kita miris melihat antrean pelamar kerja yang panjang memperebutkan tempat yang terbatas. Gelar sarjana dan magister seperti tak lagi punya arti. Padahal kalau kita menggeser titik pandang dan mau berpikir *out of the box*, potensi dan kesempatannya begitu luas.

Mereka yang mendapat pekerjaan belum tentu juga menjalaninya dengan senang. Pengetahuan dan keahlian yang dimiliki kadang tidak terpakai—tidak sedikit pekerja yang *over-qualified*. Dari sinilah istilah “budak korporat” mulai berkembang. Kerja hanya menjadi cara untuk bertahan hidup, bukan cara untuk menunjukkan potensi, mengekspresikan diri, atau memberikan makna bagi kehidupan banyak orang.

Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ketika sistem yang ada tidak lagi menghasilkan apa yang dijanjikan, dan hanya mendatangkan keuntungan bagi segelintir tapi penderitaan bagi yang lain, sudah semestinya kita *restart* sistemnya. Kita memerlukan paradigma pembangunan yang tidak sekadar mengeksploitasi apa yang

ada di dalam tanah, tapi juga mengeksplorasi segala potensi yang hidup di atas tanah; paradigma pembangunan yang tidak hanya menggali mineral, tapi juga menggali kekayaan budaya kita; paradigma pembangunan yang mengandalkan karya cipta.



Source: antaranews.com

Lima Jalur Budaya

Landasan utama dari ekonomi karya cipta tidak lain adalah kekayaan budaya kita. Masalahnya, selama ini kekayaan budaya dipandang sebagai bagian dari masa lalu yang cukup dilindungi dan dilestarikan. Tempat di perpustakaan, arsip, atau museum. Kalaupun disebut dalam perencanaan pembangunan maka tempatnya di lajur pengeluaran, bukan pendapatan, sehingga terus menerus dianggap sebagai biaya dan beban bagi pembangunan. Jika ada efisiensi, bisa dipastikan anggaran sektor inilah yang akan dipotong lebih dulu.

Sangat disayangkan, Industri berbasis kekayaan budaya sekarang sudah bernilai triliunan dolar. Tidak sedikit yang menjadikannya sebagai tulang punggung perekonomian baru. Korea Selatan adalah contoh yang selalu muncul dalam diskusi seperti ini. Kontribusi dari sektor kreatifnya terhadap perekonomian nasional negeri itu sangat signifikan, karena di samping menghasilkan pendapatan yang cukup besar juga berdampak pada peningkatan pendapatan

sektor lainnya. UNCTAD memperkirakan dari setiap ekspor produk budaya senilai USD100 ada penambahan USD284 dari ekspor produk sektor lain.

Semua itu dilakukan Korea dengan sumber daya manusia, alam, dan kekayaan budaya yang terbatas. Dalam percakapan dengan pemimpin industri dan pemerintah di sektor kreatif, saya berulang kali mendengar komentar mereka tentang perbedaan Korea Selatan dengan Indonesia. “Kalian punya segalanya, *you are a giant in the making*.” Tapi setelah 20 tahun membuat rencana, strategi, mendirikan bermacam lembaga, raksasa ini juga masih belum bangkit dari tidur panjangnya.

Salah satu problemnya adalah fokus. Seringkali kita kesulitan menentukan fokus karena memang punya terlalu banyak. Kekayaan biokultural kita termasuk yang paling besar di dunia, karena itu model seperti Korea dengan K-Pop,¹ Jepang dengan Cool Japan,² atau Inggris dengan Creative UK,³ belum tentu cocok. Sekali lagi,

¹Subgenre musik pop yang lahir dan berkembang di Korea Selatan, dengan hip-hop, R&B, dan musik elektronik sebagai pengaruh utama.

²Aspek-aspek kebudayaan Jepang yang digemari secara internasional, mencakup produk-produk teknologi, makanan, pariwisata, dan serta budaya pop dan tradisional. Kemudian diadopsi dan dijadikan strategi diplomasi publik pemerintahan Jepang untuk mempromosikan dan mengkomersialisasikan berbagai elemen budaya yang mereka miliki. Juga merupakan bentuk penguatan *soft power* yang memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

³Organisasi nonprofit yang bergerak untuk mendukung industri kreatif di Inggris (2010–2021). Ketika masih beroperasi, Creative UK memiliki berbagai program dan skema pendanaan untuk pembuatan film dan berbagai inisiatif lain.

landasan historis dan kultural dari ekonomi berbasis kekayaan budaya harus dipahami betul. Dalam kesempatan ini saya akan fokus kepada lima sub-sektor ekonomi berbasis kombinasi kekayaan alam dan budaya.

01. Ekonomi *wellness*

Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor ini berkembang sangat pesat. Saat ini total nilai industri ini sekitar USD7 triliun dan akan terus meningkat dalam dekade mendatang. Indonesia punya segalanya untuk berjaya di sektor ini, mulai dari tanaman herbal yang endemik sampai praktek dan pengetahuan lokal yang sangat beragam. Sayangnya, saat ini kita masih di urutan ke-19 dari 218 negara. Di Asia-Pasifik pun hanya urutan ke-7 dari 45 negara.



Source: antaranews.com

02. Gastronomi

Makanan adalah bahasa yang dipahami semua orang. Thailand dan Jepang sudah lama melancarkan diplomasi gastronomi, yang mendatangkan pendapatan besar dari sektor itu sendiri, dan juga membantu membuka jalan bagi masuknya berbagai produk dan jasa yang lain. Korea misal-

nya, yang 30–40 tahun lalu tidak terlihat di peta gastronomi dunia, sekarang sudah berjaya sebagai salah satu pemain utama. Ini adalah buah keberhasilan kerja lintas-sektor yang menghubungkan K-Pop dengan industri makanan dan manufaktur, yang sepatutnya menjadi pelajaran penting bagi kita. Drama Korea yang digemari di seluruh dunia adalah Kuda Troya, menembus pertahanan budaya di mana pun juga. Sekali pertahanan itu terbuka, produk lain mulai dari makanan, pakaian, alat elektronik, sampai *beauty products* yang tampil di drama Korea, merajalela di pasar. Muaranya adalah gaya hidup baru: K-Lifestyle.

03. Film dan produk audiovisual

Total nilai industri ini secara global sekitar USD 2,5 triliun dan akan terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pergeseran signifikan dengan kemunculan platform digital yang menyaingi bioskop dan *home video*. Sektor ini punya posisi strategis, karena di samping menghasilkan pendapatan yang tidak kecil, juga membuka jalan bagi produk lainnya, seperti kita lihat dalam kasus Korea Selatan.

Indonesia tentu tidak kekurangan cerita dan talenta. Dalam sepuluh tahun terakhir ada banyak film Indonesia yang meraih penghargaan internasional yang bergengsi. Produksi film juga terus meningkat setiap tahun. Masalahnya, film kita masih berkutat di dalam negeri, memperebutkan *outlet* yang sangat terbatas. Kita perlu lebih banyak layar bioskop, platform digital yang bisa menghadirkan variasi film di luar genre horor dan komedi, sehingga bisa membentuk pasar yang lebih bervariasi juga.



Source: Didi Paul

04. *Fashion* dan kerajinan lokal

Lagi-lagi, Indonesia dikenal dunia karena batik dan wastra lainnya. Jenama internasional kerap menggunakan batik, tenun, dan songket, untuk pengembangan produk mereka. Masalahnya para pelaku wastra belum lagi siap untuk bisa berperan aktif di tingkat global terutama menyangkut aspek manajerial. Akhirnya, banyak pihak yang datang untuk “membeli putus” produknya, dan tidak terjadi pengelolaan kekayaan budaya dan kekayaan intelektual.

Sama seperti gastronomi, *fashion* dan kerajinan juga bisa menjadi pintu masuk bagi produk lain. Lebih baik lagi jika memang ada strategi yang holistik, mempertemukan *wellness*, gastronomi, *fashion*, yang turut diangkat dalam karya film dan produk audiovisual lainnya. Dan ini bukan hanya untuk keperluan promosi ke dunia internasional, tapi juga untuk membentuk gaya hidup yang lebih wawas dan lestari di dalam negeri, karena

ekonomi berbasis kebudayaan tidak mungkin tumbuh dalam masyarakat yang tidak peduli pada alam, manusia, dan kebudayaan.

05. Seni pertunjukan

Di Indonesia, seni berbasis rupa, gerak, dan suara, adalah yang paling awal berkembang. Ekspresi *primeval* ini melampaui usia candi, sastra, dan warisan budaya benda lainnya. Dengan kata lain, inilah jantung dari ekspresi artistik masyarakat yang mendiami Nusantara selama ribuan tahun. Kemungkinan pengembangannya masih sangat luas, mulai dari pertunjukan tari dan teater, musik dalam berbagai genre dan bentuk, serta kegiatan pertunjukan lainnya.

Dari Mana Kita Mulai?

Dalam catatan saya, kita sudah punya banyak kajian, rencana, dan peta jalan untuk bidang ini. Semua ini menjadi bahan bagi penyusunan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, PP No. 87 Tahun 2021 sebagai regulasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2017, Perpres No. 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, dan Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Kita juga punya UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan PP No. 24 Tahun 2022 sebagai regulasi turunannya.

Pemerintah daerah juga sudah mulai menetapkan peraturan kepala daerah maupun peraturan daerah, sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Berbagai program dan kegiatan dicanangkan agar sektor ini secara keseluruhan bergerak maju. Sayangnya, dalam praktek, yang terjadi seringkali ada pengulangan dari yang lalu. Tidak ada inovasi, dan kadang diselenggarakan hanya untuk “mengejar serapan anggaran”, sehingga terkesan bahwa kita berjalan di tempat.

Karena itu terobosan diperlukan. Usul saya sederhana, fokus pada lima jalur budaya di atas, dan gunakan pendekatan holistik. Tempatkan

para pelaku budaya dan pelaku usaha di sektor ini agar memegang kendali, menentukan sasaran dan capaian, menggunakan jaringan mereka di dalam maupun luar negeri untuk mewujudkan rencana yang dibuat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, mulai dari perlindungan kekayaan budaya, memperkuat ekosistem pembiayaan, dan memastikan adanya distribusi manfaat yang adil.

Jika peta ekosistem sudah terbentuk, tentu kita lebih mudah dan cepat mengidentifikasi jenis pekerjaan, jumlah tenaga yang diperlukan, sehingga pendidikan di bidang ini dapat diarahkan lebih tepat sasaran. Diperkirakan ada sekitar satu juta lapangan pekerjaan baru yang bisa terbentuk jika ekonomi berbasis kekayaan budaya dijalankan dengan konsisten. Kerja yang bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup, tapi kerja yang bermakna, cipta yang menghasilkan karya.

